

**PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP PENERAPAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
IKLIL IMAM
NIM. 170801016

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iklil Imam
NIM : 170801016
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Penerapan Prinsip *Good governance* Di Kota Subulussalam

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 8 Desember 2022

Menyatakan,



IKLIL IMAM
NIM. 170801016

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Lulus Strata Satu
(S1)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

IKLIL IMAM
NIM. 170801016

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 8 Desember 2022
Disetujui untuk di uji/munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP . 198812072018032001

Pembimbing II



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DI KOTA SUBULUSSALAM**

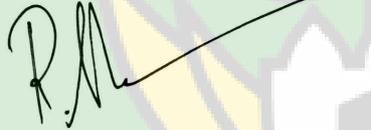
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik.

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022
20 Jumadil awal 1444 H

Banda Aceh,
Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Ketua Sidang



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Sekretaris,



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji I



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Penguji II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, Msc
NIDN. 2008048903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740327199903100

ABSTRAK

Dinasti Politik merupakan budaya politik warisan zaman kerajaan yang sampai sekarang mendarah daging. Akar dari dinasti politik bisa ditarik dari masa lalu. Hal yang terjadi di nasional juga terjadi di daerah, salah satunya di Kota Subulussalam yang merupakan salah satu kota di provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Mengetahui karakter dan proses terbentuknya dinasti politik di Kota Subulussalam, (2). Mengetahui dampak politik dinasti terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Subulussalam, (3). Mengetahui pandangan masyarakat Kota Subulussalam melihat keberadaan dinasti politik di kotanya. Adapun metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hasil penelitian ini, bahwa adanya dinasti politik di Kota Subulussalam sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Kesimpulannya adalah: (1). Adanya dinasti politik yang terbentuk Kota subulussalam yang mana Walikota dan Ketua DPRK merupakan Ayah dan Anak, kemudian keluarga lainnya juga terlibat dalam pemerintahan kota Subulussalam, misalnya menjadi anggota DPRK, Bakal Calon Keuchik dan pemegang kekuasaan strategis lainnya. (2). Fenomena politik dinasti yang terjadi di Kota subulussalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good governance* yang dibuktikan dengan tidak terpenuhi prinsip: Transparansi, demokrasi akuntabilitas budaya hukum, dan kesetaraan dan keadilan.

Key word: Politik, dinasti, Good governance, Kota Subulussalam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Penerapan Prinsip Good Government (Studi kasus Kota Subulussalam)” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman MAg, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
2. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Muji Mulia MAg, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Terimakasih Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
4. Terimakasih Kepada Bapak Ramzi Murziqin, SHI,MA, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku pembimbing I yang sudah senantiasa sabar membimbing saya pada saat menjalani proses penulisan Karya Ilmiah ini.
6. Terimakasih Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan

arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
8. Kepada orang Tua dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat peneliti. Dengan motivasi dari kalian semua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Informan yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh 15 Desember 2022
Penyusun,

Iklil Imam



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.Landasan Teori.....	7
2.1.1. Politik Dinasti	7
2.1.2. Prinsip <i>Good governance</i>	13
2.2.Pembahasan Penelitian yang relevan.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Pendekatan Penelitian	21
3.2. Fokus Penelitian.....	22
3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5. Informan Penelitian	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	24
3.6.1. Wawancara.....	25
3.6.2. Dokumentasi.....	25
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambara Umum Penelitian.....	28
4.2. Dinasti Politik di Kota Subulussalam	33
4.3. Faktor Penyebab Lahirnya Dinasti Politik di Subulussalam	37
4.3.1. Mempertahankan Status <i>Quo</i>	38
4.3.2. Masalah Kaderisasi Partai	42
4.4. Dampak Dinasti Politik Terhadap Prinsip <i>Good governance</i>	46
4.4.1 Terhadap akuntabilitas	50
4.4.2 Demokrasi	53
4.4.3 Transparansi	56
4.4.4 Prinsip Kesetaraan dan Keadilan.....	57
4.4.5 Budaya Hukum.....	59
BAB V PENUTUP	61
1.1. Kesimpulan.....	61
1.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinasti Politik merupakan kultur politik warisan zaman kerajaan yang sampai sekarang mendarah daging. Akar dari dinasti politik bisa ditarik dari masa lalu. Sri Margana seorang sejarawan Universitas Gadjah mada dalam Ningtyas mengatakan Bahwa dinasti politik bukan merupakan fenomena tetapi juga merupakan sebuah tradisi, berawal dari sebuah budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut budaya patriotisme.¹ Dalam hal ini budaya politiknya mengutamakan garis keturunan dari keluarga ayah. Dan bahkan hampir keseluruhan kerajaan di Indonesia menerapkan tradisi seperti ini, termasuk diantaranya pada masa Hindu, Budha dan Islam. Terdapat lubang jurang diantara politik Demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia dimasa modern dengan kultur dibawa oleh orang yang menjalankannya. Dalam hal ini kultur tersebut sangat sulit untuk dihilangkan di Indonesia.²

Politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era autokrasi, ikatan genealogis telah digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan. Hingga kini, ruh dari praktik politik dinasti masih berhembus di alam demokrasi.

¹ Cahyaningtyas, N. (2018). Politik Dinasti di Kabupaten Kediri Pertukaran Sosial TIM Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Negara Desa Parelur Kecamatan Kunjang. Paradigam Vol 6 No 1, 25-27.

² Cahyaningtyas, N. (2018). Politik Dinasti di Kabupaten Kediri Pertukaran Sosial TIM Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Negara Desa Parelur Kecamatan Kunjang. Paradigam Vol 6 No 1, 25-27.

Politik dinasti sudah ada di Indonesia sejak lama, politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur di berbagai daerah. Konsepnya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia.³

Pada masa reformasi, dinasti politik terus terjadi di Indonesia. Hal yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah keluarga presiden Joko Widodo yang mana anaknya Gibran rakabuming raka dan menantunya Bobby nasution yang sekarang menduduki posisi strategis pemerintahan daerah di tambah pernikahan adiknya dengan ketua mahkamah konstitusi berhasil melengkapi kekuatan-kekuasaan politik keluarga joko widodo. Kekuasaan dinasti politik mengakar kuat di provinsi Banten yang dibentuk oleh chasan sohib kemudian naiknya Ratu Atut Chosiyah menggurita hingga naiknya suami, anak, menantu, adik serta keluarga besar lainnya duduk dalam posisi eksekutif maupun legislatif DPD dan DPR. Itu merupakan contoh kecil yang dapat kita lihat bagaimana suburnya politik di Indonesia. Contoh lain yang dapat kita lihat seperti praktik manipulasi untuk memenangkan anggota keluarga yang dilakukan oleh bupati lebak Mulyadi jayabaya, dengan memanfaatkan jabatan untuk memenangkan anaknya Iti octavia jayabaya pada pilkada lebak tahun 2013. Hal serupa dilakukan juga

³Alvina Alya Rahma, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

oleh Ratu Atut sebagai gubernur banten yang memenangkan ibu tirinya Heryani pada pilkada banten tahun 2010 dengan cara membagi-bagikan uang kepada sejumlah kepala desa (money politik). Dampak buruk lainnya adalah regenerasi pemerintahan yang berputar hanya dalam satu atau beberapa keluarga saja yang tidak disertai dengan kapasitas dan kapabilitas leadership hingga nantinya kepentingan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan dalam pemerintahan dan orang yang berkompeten tersingkirkan.⁴

Berkaca dari fakta diatas, bila dilihat dari analisis politik modern, kemunculan politik dinasti diakibatkan oleh tidak berjalannya sistem demokrasi dengan baik. Sebab, hal ini yang kemudian secara struktural mengakibatkan otonomi yang berlebihan sehingga muncul kemudian kekuasaan etnis di daerah. Dari etnisitas inilah dinasti tumbuh, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik dan pendidikan politik tidak berjalan dengan baik.⁵

Menurut Martien Herna dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada yang cacat.⁶ Namun, rakyat sebagai pemilih juga patut dikritisi,

⁴Alvina Alya Rahma, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

⁵Alvina Alya Rahma, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

⁶ Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia”, Journal of Government and Civil Society Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 2, 2017, hlm.113.

sebab secara substansial demokrasi yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas.⁷

Hal yang terjadi di Nasional juga terjadi di daerah salah satunya di Kota Subulussalam yang merupakan salah satu kota di di provinsi Aceh. Untuk lebih detail melihat adanya dinasti politik di kota subulussalam maka perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Dinasti Politik Kota Subulussalam

No	Nama	Jabatan/Periode	Hubungan Keluarga
1.	H. Affan Alfian	Walikota Subulussalam/2019-2024	Ayah
2.	Ade Fadly Pranata Bintang	Ketua DPRK subulussalam/2019-2024	Anak Kedua
3.	Ade Rizky Noviani Br. Bintang	Anggota DPRK Subulussalam 2019/2024	Anak Pertama

Dalam tabel diatas dapat dilihat bagaimana pengaruh keluarga dalam upaya membentuk dinasti politik di kota subulussalam.

Memang demokrasi tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Sebelumnya ada yang pernah meneliti bahwa dinasti politik berpengaruh terhadap *good governance* salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Alvina mengenai Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila

⁷Ilham Ramadhan, 2018 Politik Dinasti Di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya), Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh

Di Indonesia. Sebab salah indicator pemerintahan yang baik adalah berjalannya demokrasi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Berdasarkan latar belakang dan pengalaman penelitian sebelumnya yang sudah peneliti sajikan diatas diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang dinasti politik **“Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Penyelenggaraan Prinsip *Good governance* di Kota Subulussalam”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terbentuknya dinasti politik di Kota Subulussalam?
2. Bagaimanakah dampak politik dinasti terhadap penerapan prinsip *good governance* di Kota Subulussalam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas terkait politik yang sedang berjalan di Kota Subulussalam.

1. Untuk mengetahui penyebab terbentuknya dinasti politik di Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui dampak politik dinasti terhadap penerapan prinsip *good governance* di Kota Subulussalam.

⁸Alvina Alya Rahma, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

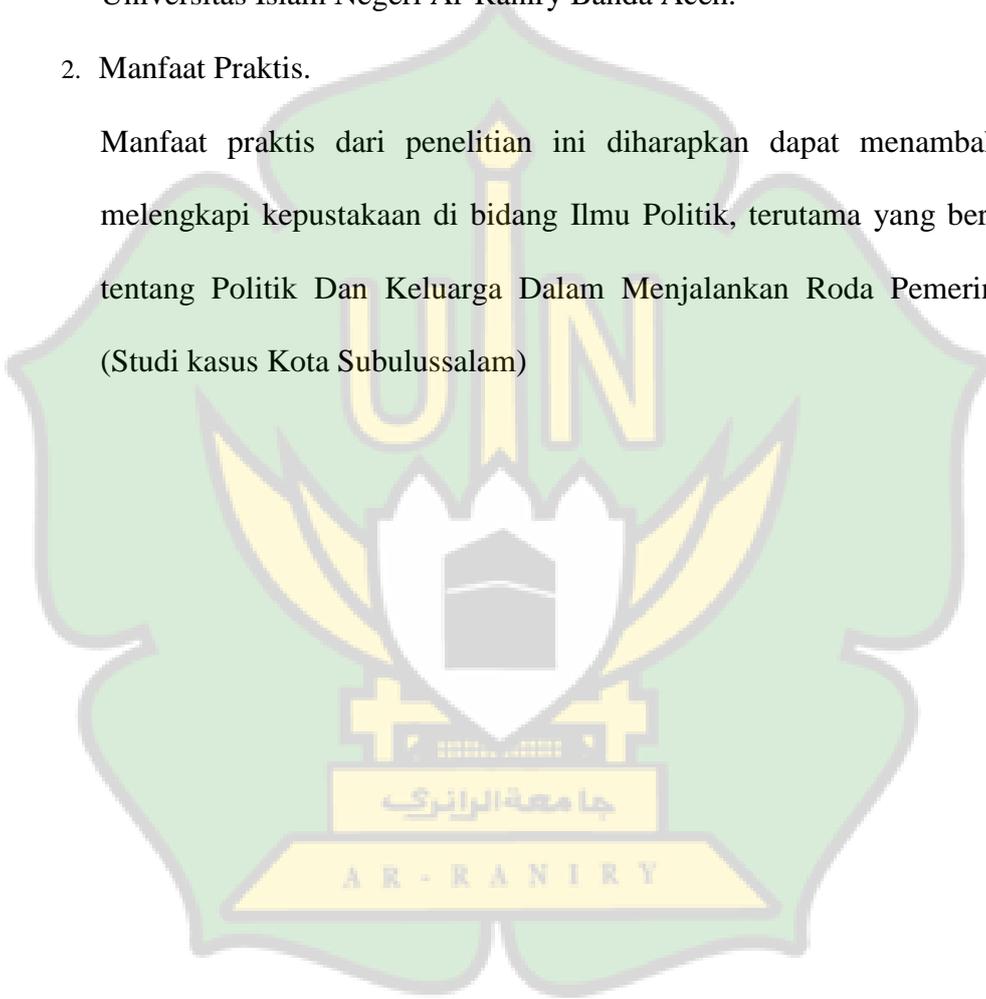
1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Politik Dan Keluarga Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan (Studi kasus Kota Subulussalam)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Politik Dinasti

Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.⁹

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat menyebutnya oligarki politik. Sedangkan politik dinasti dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik sehingga mereka terkadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan sebagai elit partai politik, elit militer dan polisi, elit

⁹ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society Universitas Negeri Semarang*, Vol 1, No 2, 2017, hlm.113.

¹⁰ Wasisto, Raharjo Djati, "Revivalisme kekuatan familisme: dinasti politik di aras lokal, *Jurnal Sosiologi masyarakat*, 2013, hlm 203.

pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elite aktivis.¹¹

Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun – temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat tetapi kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi didukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Sedangkan dinasti politik secara sederhana yang merupakan sebab akibat terjadinya politik dinasti tersebut, sebab dinasti ini muncul ketika orang kekuasaan adalah salah satu kerabatnya atau keluarganya sehingga memudahkan untuk masuk dalam lingkungan kekuasaan tersebut dengan menduduki jabatan – jabatan yang strategis melalui rekrutmen yang dilakukan penguasa.¹²

Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat dianalisis dari dua hal. Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjangkau calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara

¹¹ Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal FISIP UMRAH* VOL 2, hlm 115, 2011.

¹² Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal FISIP UMRAH* Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 117

mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan pertahanan.¹³

Terdapat tiga jenis politik dinasti yang berkembang di Indonesia. Ketiganya berpotensi menimbulkan perilaku korupsi.¹⁴ Jenis dinasti politik pertama ialah regenerasi. "Modelnya seperti arisan keluarga," Ciri dinasti jenis ini adalah kepemimpinan tanpa jeda, yakni satu keluarga memimpin sebuah daerah tanpa jeda. Model dinasti politik lain adalah politik lintas kamar atau cabang kekuasaan. Jenis dinasti politik terakhir ialah lintas daerah, yakni anggota sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah. Praktek kekuasaan dinasti politik tersebut merugikan masyarakat.

Dinasti politik memiliki beberapa karakter antara lain adalah karakter dinasti politik yang vulgar dan karakter dinasti politik yang halus.¹⁵ Dinasti Politik muncul dengan karakter yang halus, berupa gejala "Dinasti Politik" yang mendorong sanak keluarga elite-elite lama untuk terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang diturunkan "secara demokratis" oleh pendahulu mereka. Pada gejala ini, penyesuaian terhadap etika demokrasi modern dilakukan dengan "mempersiapkan" putra-putri yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang demikian ini. Jadi saat mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan diakibatkan oleh faktor darah dan keluarga, melainkan oleh faktor-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasional. Meskipun terkadang gelar pendidikan mereka dapat dibeli dengan nama keluarga mereka.

¹³ Wasisto, Raharjo Djati, *Op.Cit.* hlm 203.

¹⁴ <https://nasional.tempo.co/read/833610/3-jenis-dinasti-politik-di-indonesia-mulai-model-arisan-hingga-lintas-kamar/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 18 April 2022

¹⁵ http://www.scribd.com/mobilr.doc/105224306/device_features. Diakses pada tanggal 8 April 2022.

Dinasti Politik dapat tampil dalam bentuk yang lain, lebih vulgar dan identik dengan otoritarianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik modern yang sudah ada sebelumnya dan yang sudah dibekukan dan dikondisikan sedemikian rupa sehingga “rakyat” melalui wakilnya, hanya bisa memilih anak/istri dari keluarga yang sedang berkuasa. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah Dinasti Politik yang dipilih bukan secara sukarela oleh rakyat, tetapi secara represif.

Ditinjau dari perspektif ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta.¹⁶

Quasi-familisme, model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut. Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial. Oleh karena itu, dalam model quasi-familisme, semua anggota famili

¹⁶ *Ibid*, hlm 203.

berusaha mengidentifikasi ciri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga lainnya.¹⁷

Adapun proses identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun situs keluarga lainnya. Maka dalam quasi-familisme sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya baik yang berada dalam ranah formal dan informal. Hal inilah yang menjadikan *quasi-familisme* berkembang seperti kekuatan politik oligarki yang mampu memberikan pengaruh di segala lini kehidupan. Egoisme-familisme, model dinasti politik didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan.¹⁸

Adapun dari sisi masyarakat, egoisme sendiri ditunjukkan dengan kecenderungan untuk menjaga agar famili tertentu tetap menguasai tampuk kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena penguasa berhasil membina dan mempererat kohesi sosial dengan masyarakat melalui serangkaian program kebijakan “gentong babi” atau *pork barrel* yakni dalam perspektif Ilmu Politik, di mana terdapat suatu

¹⁷ Wasisto Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi...*, hal. 23.

¹⁸ Ilham Ramadhan, “Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, hlm. 20, 2018.

tindakan politik yang disebut patronase. Itu merupakan praktek-praktek pembagian keuntungan oleh politisi yang mendistribusikan sesuatu secara individual kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan politik. Pertukaran terjadi di dalam aktivitas tersebut. Dengan menggunakan sumber daya publik yang ada, aktor akan terlibat pada hubungan pertukaran berupa barang dan atau jasa yang diberikan dengan dukungan yang diberikan masyarakat kepada aktor tersebut sebagai imbalannya. Hal ini sarat akan tindak perilaku korupsi di mana menyangkut upaya politisasi anggaran. Dengan adanya program populis tersebut, penguasa dapat menanamkan romantisme dan jejaring politik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Masyarakat menilai bahwa rezim penguasa dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan populis maupun budaya permisif yang masih kuat di masyarakat.¹⁹

Namun demikian, dinasti politik ternyata juga memiliki dampak positif. Dengan sistem kepemimpinan di Indonesia yang pada umumnya menganut sistem kepemimpinan kesukuan, maka tidaklah menjadi hal yang aneh adanya sistem politik dinasti. Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok maupun golongan tertentu. Sebagai salah satu contoh, suku-suku di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan dinasti, di mana pucuk pimpinan akan dimiliki atau pun ditempati berdasarkan garis keturunan (regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis). Apabila secara “kebetulan” generasi pemilik kekuasaan merupakan generasi yang memang kompeten dan mumpuni, maka sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu dalam pengasingan grup ataupun kelompok perusak.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 21.

Masyarakat yang dipimpin secara langsung dan tidak langsung memberikan penuh kepercayaan kepada dinasti pemimpin mereka, tidak memandang pantas atau tidak dalam memimpin. Kekuatan dari sistem politik dinasti adalah, apabila sudah dipercaya ataupun masyarakat telah memiliki keyakinan pada satu garis keturunan tertentu, maka pengendalian ataupun pengaturan terhadap sistem sosial dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi bagian yang menyatu dengan sistem kekerabatan kepemimpinan tersebut.

Akan tetapi, dinasti politik dapat pula berdampak negatif yakni ketika sistem perpolitikan tersebut dipadupadankan pada pengambilan kekuasaan. Makna kepemimpinan bukan lagi menjadi hal krusial pada sistem dinasti dengan konotasi negatif. Hal terpenting adalah bagaimana menjaga keutuhan kekuasaan pada generasi yang sama. Skema pengorbitan instan disusun dengan singkat dan tanpa persiapan. Dampak utamanya adalah kepada nilai hakiki kekuasaan dan kepemimpinan yang menjadi pudar. Kualitas dan kapabilitas para pemimpin sangat jauh dari harapan.

2.1.2. Prinsip *Good governance*

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance membimbing pemerintahan yang jujur dan adil dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, keadilan, dan

kesetaraan. Tata kelola yang baik juga mengatur pola hubungan antara pemerintah, bisnis, dan publik.²⁰

a. Prinsip Demokrasi²¹

Peningkatan kinerja organisasi pemerintah bisa dibidang berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga para pemangku kepentingan tersebut sangat menghargai kehadiran organisasi pemerintah. Prinsip demokrasi menempatkan kedaulatan publik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi itu sendiri didasarkan pada beberapa pilar berikut: legislatif, eksekutif, lembaga yudikatif, dan pers sebagai pengawas. Demokrasi berjalan efektif apabila pemerintah menjunjung tinggi etika, integritas, dan moralitas dalam kegiatannya, prinsip konstitusionalisme ditegakkan dengan kokoh, penegakan supremasi hukum, akuntabilitas publik yang berjalan. Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi memfasilitasi warga negara untuk menentukan masa depannya dengan berpartisipasi dalam pemilihan pejabat publik. Proses demokrasi yang efektif bisa dibidang akan menghasilkan pemimpin yang sangat etis dan berintegritas tinggi serta masyarakat yang membantu mencapai kinerja organisasi yang ditargetkan.

²⁰ Budi, S., & BAPPENAS, "Modul penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 2007. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)" 2007.

²¹ Dzingai, I., & Fakoya, M., "Pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Johannesburg (BEJ)", 2017.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi mengacu pada penyediaan informasi yang cukup melalui keterbukaan yang mudah diakses oleh publik. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada publik.

c. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi dan tanggung jawab. dimensi akuntabilitas sektor publik terdiri dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas integritas dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas akan tercapai apabila komponen organisasi menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan organisasi. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen seluruh komponen organisasi untuk mencapai akuntabilitas yang efektif.

d. Prinsip Budaya hukum

Budaya hukum menyiratkan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif serta kepatuhan hukum yang penuh kesadaran. Penegakan hukum dan kepatuhan hukum sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan publik.

e. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip tersebut menyiratkan bahwa pemangku kepentingan menerima perlakuan yang adil dan setara dari lembaga dan aparatur pemerintah. Perlakuan yang sama dalam organisasi sangat penting untuk mengurangi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang mengacu pada perilaku yang

berdampak negatif pada organisasi, termasuk penurunan produktivitas dan pengikisan citra organisasi, peningkatan biaya, dan penurunan kinerja organisasi.

Penerapan tata kelola yang baik juga memberikan beberapa dampak positif, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- b. Iklim usaha yang sehat,
- c. Peningkatan daya saing, dan penurunan penyimpangan
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
- e. Asimetri informasi yang lebih rendah

Pemerintah dapat memperlakukan pemangku kepentingannya secara setara dengan memberikan pelayanan publik secara profesional, menawarkan kesempatan yang sama kepada semua warga negara yang memenuhi syarat secara hukum untuk menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum, dan memberikan sanksi hukum berdasarkan undang-undang yang ada berdasarkan bukti hukum yang meyakinkan dan adil.²³

2.2. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini dijelaskan terkait uraian penelitian terdahulu yang relevan.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

²² Al-Bassam, B., "Hubungan antara pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi selama masa krisis", *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Eropa*, 2(2), hlm 1-18, 2013.

²³ Khairuddin, dkk., "Kualitas pemerintahan yang baik pemerintah provinsi Indonesia pasca reformasi: Pendekatan PCA" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 25 No. 1 April 2022, hlm 76.

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Winda Roselina Effendi dengan judul “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status *quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan pertahanan.²⁴

Dinasti Politik merupakan eksekusi negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan intim genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan famili. Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu *neopatrimonialisme*, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanasasi’ lokal.²⁵

²⁴ Winda Roselina Effendi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 No 2, (2018), hal. 23.

²⁵ Winda Roselina Effendi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 No 2, (2018), hal. 23.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jumrah dengan judul “*Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan)*”, pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan Bangsawan Bima di pemerintahan di dalam struktur kekuasaan, dimulai dari munculnya Sultan Abdul Kahir sebagai kesultanan bangsawan dalam politik lokal Bima. Pengaruh Sultan ini memberikan peluang munculnya Ferry Zulkarnain dalam politik lokal. Ferry Zulkarnain pada mulanya menjadi Ketua DPRD Bima dan kemudian terpilih sebagai Bupati pada pilkada pada tahun 2005 dan terpilih kembali pada pilkada 2010. Ini membuka ruang bagi dominasi Bangsawan dalam politik lokal, selain Ferry Zulkarnain juga terdapat beberapa saudaranya serta istrinya Dinda Damayanti Putri masuk dalam DPRD dan birokrasi lokal. Proliferasi kalangan bangsawan dalam politik lokal Bima. Pada bidang ekonomi juga jejaring kuasa bangsawan seperti pusat bisnis lokal dan area wisata di Bima.²⁶

Penelitian ketiga ditulis oleh Ilham Ramadhan dengan judul “*Politik Dinasti Di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)*” pada tahun 2019. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Kepemimpinan H.Teuku Zulkarnaini atau yang biasa di sapa Ampon Bang di mulai dari terbentuknya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002, H.T Zulkarnain memimpin Nagan Raya kurang lebih 15 tahun. Di dalam periode 15 tahun kepemimpinan, Ampon Bang telah memenangkan 2 kali Pilkada di Nagan Raya, periode pertama yaitu pada tahun 2007-2012 dan periode kedua pada tahun

²⁶Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan)”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 12, 2018.

2012- 2017 di tambah masa jabatan Pj. Bupati Nagan Raya 4 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Ampon Bang telah membangun dinasti politik dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahannya. Pengaruh Ampon Bang dalam setiap kegiatan politik yang terjadi antara lain, menempatkan kroni-kroninya di posisi strategis di pemerintahannya, membantu memenangkan adiknya TR Keumangan dalam pilkada serentak tahun 2017, mempromosikan dalam jabatan, mendoktrin PNS dan aparatur desa. Tantangan yang dihadapi dari lawan politiknya dengan cara memfitnah kepemimpinannya dengan isu korupsi, pembangunan yang tidak merata. Lebih lanjut dilihat dari dampak positif kekuasaannya memperoleh WTP selama 8 kali berturut-turut, serta penataan bangunan perkantoran yang sangat rapi. Sementara dampak negatifnya, hilangnya kebebasan masyarakat untuk memilih secara bebas dan rahasia.²⁷

Penelitian keempat di tulis oleh Wimmy Haliim dan Andy Ilman Hakim dengan judul “*Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik*” pada tahun 2020. Fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dinasti politik keluarga Sutrisno melalui birokrasi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan capaian program yang telah dijalankan. Mengingat dampak dari praktik dinasti politik keluarga Sutrisno, sebagian menunjukkan anomali. Temuan dari hasil penelitian ini menggambarkan tingkat kepuasan publik tinggi terhadap kinerja birokrasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di samping karena faktor dinasti keluarga Sutrisno yang mapan secara politik dan berkonsekuensi pada

²⁷Ilham Ramadhan, “Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, hlm 51, 2018.

kekuasaan atas kendali birokrasi, basis sosial jaringan keluarga Sutrisno juga berperan penting meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kerja birokrasi di berbagai bidang.²⁸

Penelitian kelima yang ditulis oleh Imroatun Nika dengan judul “*Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020)*” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik sebagaimana terjadi pada proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Kedua, ke depan, diperlukan sebuah model rekrutmen politik yang ideal, seperti penerapan model *civil service reform* atau model *compartmentalization* dengan proses rekrutmen yang terbuka.²⁹

²⁸ Wimmy Haliim dan Andy Iman Hakim, “Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik”, *Jurnal Politik profetik*, Volume 8, Nomor 2. 2020.

²⁹ Imroatun Nika, “Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020)”, *Jurnal Lex Renaissance*, 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³¹

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.³²

³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*,” Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm 5.

³¹Moleong Lexy, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011, hlm 4.

³²Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm 67.

3.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Penerapan Prinsip *Good governance* Di Kota Subulussalam serta pandangan masyarakat Kota Subulussalam melihat keberadaan dinasti politik di kotanya.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kota Subulussalam.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³³ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang

³³Burhalan, Bugin, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*”, hlm 132.

³⁴*Ibid.* 132.

memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.³⁵ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.³⁶ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.³⁷

Dalam penelitian ini penulis menentukan kriteria subjek penelitian, yaitu: (1) orang yang langsung dan berperan sebagai pelaku yaitu dinasti politik dan (2) orang yang dianggap lebih mengerti tentang jalannya pemerintah Kota Subulussalam selama jalannya dinasti politik.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1)	Ade Fadly Pranata Bintang (Ketua DPRK Subulussalam)	1 Orang
2)	Masyarakat Kota Subulussalam / Stakeholder	4 Orang

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 171.

³⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2013), h. 92.

³⁷Faisal Hanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 67.

3)	Pengamat Politik Subulussalam	1 Orang
JUMLAH		6 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data penelitian mengenai Pengaruh Dinasti Politik terhadap Penerapan Prinsip Government. Maka peneliti menggunakan beberapa cara mengumpulkan data sebagai berikut:

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.³⁸ Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan mendalam. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁹

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari

³⁸Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial...", hlm 118.

³⁹Sutopo, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Surakarta: UNS, 2016, hlm 72.

walikota Subulussalam, pengamat politik, masyarakat, anggota DPRK dan komisi DPRK Kota Subulussalam dan lawan politik para penguasa yang tergolong dalam pihak dinasti politik. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3.6.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data foto-foto kegiatan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, laporan kinerja pemerintah Kota Subulussalam dan foto penelitian.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, apa bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi.

⁴⁰Basrowi Dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 158.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

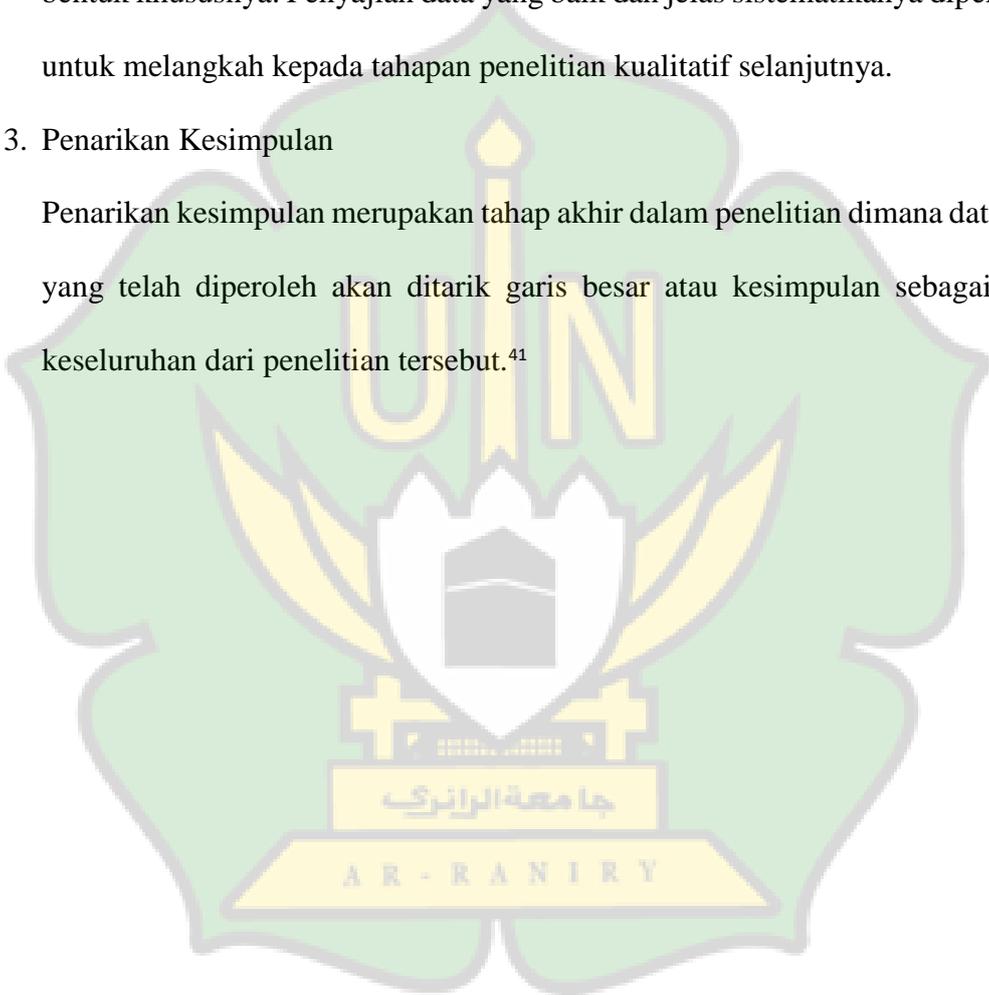
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁴¹



⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Aceh tepatnya di Kota Subulussalam. Kota Subulussalam merupakan kota yang strategis. Secara historik, konon pusat kota Subulussalam dulunya berada di Rundeng. Namun kini pusat dari kegiatan masyarakat terletak di Kecamatan Simpang Kiri karena pada hakikatnya ibukota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan pusat permukiman dan kegiatan penduduk, serta sebagai pusat aktivitas manusia yang meliputi pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan lainnya.⁴²

Sejarah Kota Subulussalam, dari awal hingga sampai saat ini adalah sejarah yang begitu panjang, dimulai pada saat Subulussalam merupakan hutan belantara yang memiliki penduduk yang jarang. Awalnya penduduk yang pertama kali mendiami Subulussalam yaitu Suku pakpak yang dibentuk saat adanya pemukiman, bertambahnya penduduk melalui program transmigrasi hingga berkembang seperti saat ini menjadi Kota Subulussalam. Nama kota Subulussalam diberikan oleh gubernur Aceh yang bernama Prof. Ali Hasymi yang berasal dari salah satu kata dari sebuah ayat Al-qur'an yaitu surah Al-maidah ayat 16 yang berarti "jalan menuju keselamatan". Kota Subulussalam merupakan suatu daerah yang sangat strategis, ibukota terletak di empat simpang menuju ke empat kecamatan lain yaitu berada di kecamatan Simpang Kiri dan menuju kecamatan longkib, kecamatan Sultan Daulat, kecamatan runding. Kota ini merupakan daerah hasil pemekaran dari

⁴² <http://subulussalamkota.go.id/> di akses 30 November 2022

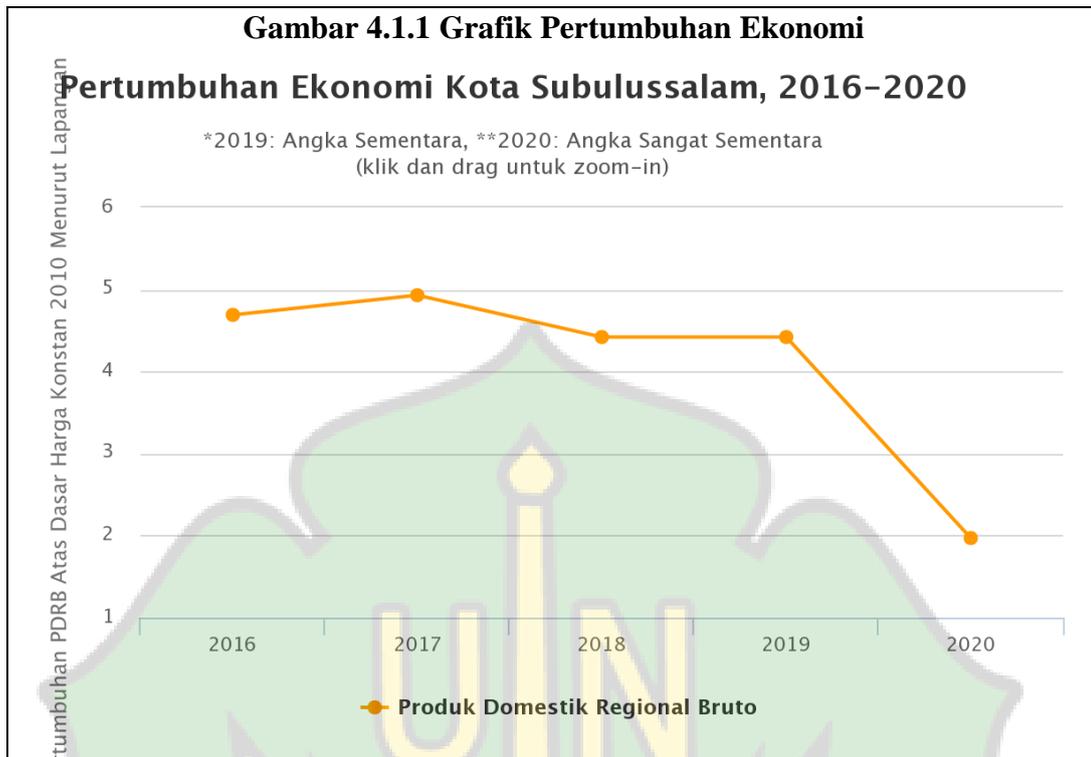
kabupaten Aceh Singkil yang baru 9 tahun, tepatnya tanggal 2 januari 2007. Kota Subulussalam terbentuk dengan keluarnya undang-undang RI Nomor 8 tahun 2007. Pada saat pembentukan pada tahun 2007, Kota Subulussalam terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 74 kampung/desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri (14 desa), Kecamatan Penanggalan (10 desa), Kecamatan Rundeng (23 desa), Kecamatan Sultan Daulat (17 desa) serta Kecamatan Longkib (10 desa). Transportasi membuat Kota Subulussalam mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kota Subulussalam memiliki daerah yang sangat luas, daerahnya mencapai 131,100 hektar. Hal ini memungkinkan tersedianya lahan pertanian dan perkebunan sehingga hasil yang diperoleh dari lahan tersebut merupakan hasil pertanian yang dijadikan sebagai andalan dan merupakan mata pencaharian penduduk Kota Subulussalam. Tanaman yang ditanam seperti karet, sawit dan sayur mayur. Penduduk di kota Subulussalam ini sebagian besar merupakan petani. Mereka mengandalkan hasil pertanian sebagai mata pencaharian. Hasil pertanian merupakan hal yang utama dalam meningkatkan perekonomian Kota Subulussalam yang sebagian besar terdiri dari Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Longkib.

Kelapa Sawit merupakan hasil perkebunan yang paling menonjol dari Kota Subulussalam dan merupakan salah satu ikon atau ciri khas dari kota tersebut. Oleh karena itu, para pendatang yang baru berkunjung dapat mengetahui bahwa potensi utama kota ini adalah sawit.

Secara geografis di Kota Subulussalam pada zaman dulu banyak kita jumpai sungai-sungai besar seperti sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang

melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, sungai Lae Batu-Batu yang mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di sungai Lae Soraya dan masih banyak sungai yang lainnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa dulunya Kota Subulussalam menggunakan jalur transportasi air yaitu melalui jalur sungai dengan menggunakan sampan atau disebut dengan *bongky* dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat *Boang* yakni masyarakat etnis singkil. Perbaikan dan pembangunan jalan dilakukan mulai dari awal pemekaran sampai sekarang ini. Pada awal pemekaran kota Subulussalam tahun 2007 panjang jalan kota Subulussalam sekitar 269,26 km. jalan yang di data peningkatan pembangunan sudah mulai ditingkatkan. Sudah banyak kendaraan yang digunakan masyarakat dalam berlalu lalang melintasi Kota Subulussalam, sarana transportasi mulai ditingkatkan baik transportasi antar kota, transportasi antar kota ke desa maupun angkutan antar provinsi.

Menurut pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam sejak tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih detail dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

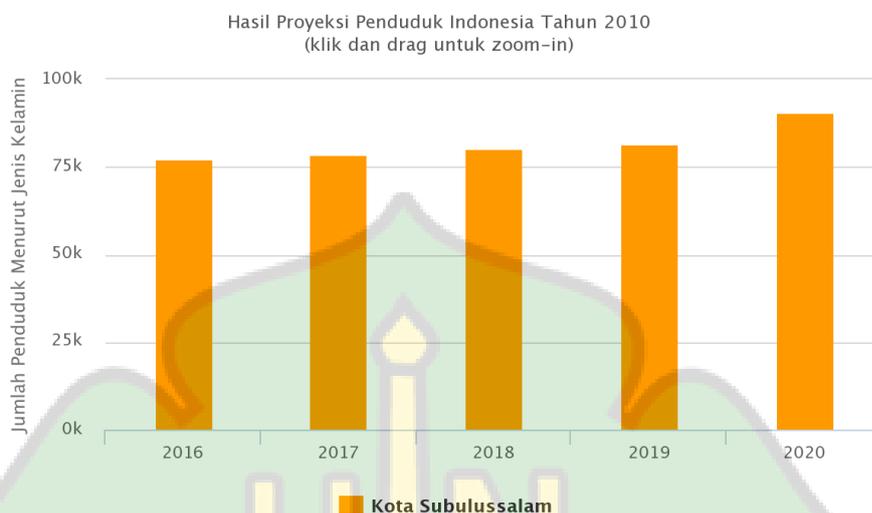


Pertumbuhan ekonomi menurun salah satunya juga disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang tidak mampu mengontrol pasar. Sehingga hasil perkebunan sawit yang melimpah yang sudah menjadi lokomotif warga tidak mampu mendorong perekonomian masyarakat Kota Subulussalam.

Kemudian jika melihat dari kependudukan Kota Subulussalam terjadi kenaikan jumlah penduduk sejak 2016. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut dalam dilihat dalam chart dibawah ini yang merupakan data valid dari BPS sebagai berikut:

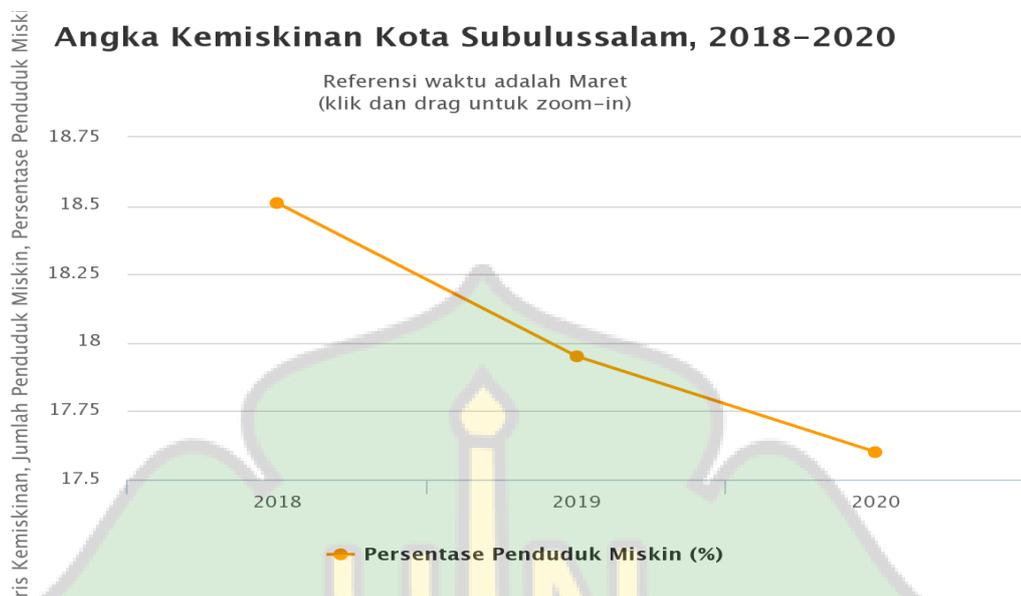
Gambar 4.1.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Subulussalam, 2016–2020



Meski mengalami kenaikan jumlah penduduk di Kota Subulussalam, angka kemiskinan sejak tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan kota Subulussalam masih termasuk dalam 10 Kabupaten/ Kota termiskin di Aceh tepatnya berada di peringkat ke-9 dengan angka kemiskinan 17,43%. Untuk lebih detail perhatikan tabel dibawah ini:.....

Gambar 4.1.3. Angka Kemiskinan



Kota Subulussalam memiliki luas 139.100 hektar, pada pertengahan tahun 2008 jumlah penduduknya berkisar 68.729 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 33.883 jiwa dan perempuan 34.846 jiwa, bahwa terdapat lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Laju pertumbuhan kota Subulussalam cukup tinggi yaitu pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 73.708 jiwa. Mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang etnis diantaranya Etnis Singkil (boang), etnis Batak (Pak-pak), etnis Aceh, Etnis Alas, Minang dan Jawa menjadikan kota ini sebagai kota yang multi etnis. Dalam komunikasi sehari-hari penduduk Kota Subulussalam menggunakan bahasa daerah yaitu Bahasa Boang dan Bahasa Pak-pak.

Hal ini membuat kota Subulussalam menjadi daerah yang heterogen terus tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya zaman. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membuat kota Subulussalam semakin padat, berbagai etnis berkumpul menjadi satu mulai dari suku Pakpak, jawa, Aceh, minang dan lainnya.

4.2. Dinasti Politik di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam sudah sejak lama didiami oleh berbagai suku termasuk di antaranya suku Singkil, suku Pakpak, Aceh, Jawa dan sebagainya. Kota Subulussalam merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil tepatnya pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007. Hingga saat ini Kota Subulussalam sudah mempunyai 5 kecamatan dan 82 desa.⁴³

Dapat dilihat Sejak pemekaran, Kota Subulussalam sendiri sudah mengalami empat kali pergantian pemerintahan. Pemegang kekuasaan pertama adalah Drs. H. Asmaudin, SE, MM. yang merupakan Pejabat (Pj) walikota dengan masa jabatan sejak 15 Juni 2007 sampai dengan 15 Juni 2008

Pemerintahan di Kota Subulussalam kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Drs. Marthin Desky, MM. dengan masa jabatan dari 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 yang juga merupakan Pj Walikota Subulussalam. Pada tanggal 5 Maret 2009 di Kota Subulussalam kembali terjadi pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh pasangan H. Merah Sakti, SH. dengan H. Affan Alfian Bintang, SE. Pada pemilihan kepala daerah selanjutnya untuk periode 2014-2019, kepemimpinan H. Merah Sakti, SH kembali memenangkan kontes Pilkada untuk yang kedua kalinya. Tapi pada periode kedua ini, H. Merah Sakti, S.H. tidak lagi ditemani pasangan sebelumnya yaitu H. Affan Alfian Bintang, justru H. Affan Alfian Bintang menjadi lawan politiknya pada pemilihan Walikota Subulussalam periode 2014-2019 ini yang pada akhirnya H.

⁴³ <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 september 2022

Merah sakti kembali memenangkan pilkada dengan pasangannya Drs. Salmaza Kombih.

Lebih detail mengenai Walikota/Wakil walikota Subulussalam dari pertama Kota ini terbentuk, maka perhatikan tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Walikota/Wakil walikota Subulussalam dari masa ke masa

No	Periode	Wali Kota	Wakil	Ket
1.	14 juni 2007-15 juni 2008	Asmaudin	-	Penjabat
2.	16 Juni 2008- 4 Maret 2009	Marthin Desky	-	Penjabat
3.	5 Maret 2009- 5 Maret 2014	Merah Sakti Kombih	Affan Alfian Bintang	Definitif
4.	5 Maret 2014- 5 Mei 2014	Damhuri	-	Pelaksana Harian
5.	5 Mei 2014- 5 Mei 2019	Merah Sakti Kombih	Salmaza	Definitif
6.	6 Mei 2019- 14 Mei 2019	Taufik Hidayat	-	Pelaksana harian
7.	14 Mei 2019- Petahana	Affan Alfian Bintang	Salmaza	Definitif

Pada pemilihan kepala daerah periode 2019-2024, H. Merah Sakti yang sudah menjabat selama dua periode, tentu tidak dapat kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota Subulussalam sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

*“Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.*⁴⁴

Namun menariknya, pada pemilihan tersebut, para pendukung H. Merah Sakti mencalonkan istri beliau, yakni Hj. Sartina yang diharapkan dapat melanjutkan peran H. Merah Sakti dalam memimpin Kota Subulussalam.

Pada pemilihan wali Kota Subulussalam ini, Hj. Sartina didampingi oleh politisi muda yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kota Subulussalam yakni Dedi Anwar Bancin SE. Namun perjuangan Hj. Sartina tersebut ternyata tidak membuahkan hasil.

Pasangan yang berjudul SADA (Sarlina-Dedi) ini justru dikalahkan oleh mantan wakil walikota yang pernah menjabat bersama dengan H. Merah Sakti serta pernah menjadi lawan politik H. Merah Sakti juga pada periode 2014-2019 yaitu H. Affan Alfian yang didampingi oleh Salmaza Kombih yang juga mantan wakil walikota dari H. Merah Sakti. Dengan demikian, kekuasaan kota Subulussalam saat ini dipegang oleh kedua mantan wakil walikota Subulussalam yang keduanya sama-sama pernah menjadi wakil dari H. Merah Sakti. Mereka berjudul BISA (Bintang-Salmaza).

Sementara itu, disisi lain, hadir pula nama Ade Fadly, S.Ked dan Kiki Bintang sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif periode 2019-2024. Keduanya merupakan putra dan putri H. Affan Alfian Bintang di mana Ade Fadly terpilih sebagai anggota legislatif dari Dapil 1 dan Kiki Bintang dari Dapil 5 kota Subulussalam. Ade Fadly bahkan mendapatkan suara terbanyak sehingga

⁴⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945

menduduki ketua DPRK periode 2019-2024 sejalan dengan periode H. Affan Alfian Bintang, ayah kandungnya sendiri.

Kedepannya, penguasaan tersebut dipelopori oleh sebuah keluarga yang menduduki jabatan penting baik sebagai walikota maupun ketua dan anggota DPRK di Kota Subulussalam. Menurut Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), fenomena seperti ini lazim pula dikenal dengan istilah “Dinasti Politik dengan Model Lintas Kamar”.

Subulussalam adalah kota hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan penghasil sawit. Meskipun Subulussalam merupakan kota hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan, tidak menjadikan Kota Subulussalam menjadi tertinggal. Kota ini semakin hari semakin maju karena letaknya yang strategis dan potensi sumber daya alamnya juga bagus sehingga mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian dari segi politik Kota Subulussalam juga menjadi pusat perhatian karena pemerintahan di Kota Subulussalam dinilai berbentuk dinasti politik lintas kamar. Dinasti politik lintas kamar ini merupakan sebuah fenomena baru di dalam pemerintahan Kota Subulussalam karena baru pada periode ini kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu keluarga.

Pada kekuasaan eksekutif atau yang menjabat sebagai Walikota Subulussalam yaitu H. Affan Alfian Bintang sedangkan yang menjabat sebagai ketua DPRK atau pejabat legislatif adalah anak kandung dari Walikota Subulussalam sekarang yaitu Ade Fadly S.Ked.

Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di pemerintahan Kota Subulussalam. Terlebih lagi ada dua orang anak dari H. Affan Alfian Bintang yang menjabat sebagai pejabat legislatif selain Ade Fadly ada satu orang lagi putri dari Walikota yaitu Kiki Bintang yang merupakan anggota legislatif DPRK Subulussalam namun berasal dari daerah pemilihan yang berbeda dengan saudara kandungnya yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRK.

4.3. Faktor penyebab lahirnya dinasti politik di Subulussalam

Dari segi politik, Kota Subulussalam memperlihatkan aktivitas politik yang musiman. Hal itu terlihat ketika adanya kontestasi pemilu atau pilkada dan kurangnya partisipasi politik masyarakat. Misalnya, minimnya minat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat dan praktik dinasti politik yang terjadi.⁴⁵ Hal ini juga menjadi alasan kuat kenapa di kemudian hari lahirnya politik dinasti di Kota Subulussalam karena memang kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di dunia politik sehingga setiap politisi senior berusaha melibatkan unsur keluarga masuk dalam politik. Dua alasan diantaranya yang melatarbelakangi adanya politik dinasti di Kota Subulussalam sebagai berikut:

4.3.1. Mempertahankan *Status Quo*

Dalam praktik politik dinasti yang terjadi di kota Subulussalam, peneliti melihat bahwa ini merupakan bagian dari tujuan untuk menjelaskan preferensi orang untuk mempertahankan status quo relasi keluarga untuk menguasai perpolitikan di Subulussalam. Jadi ketika sudah ada salah satu dari keluarga yang

⁴⁵<https://www.rmolaceh.id/Subulussalam-politik-dan-ekonomi> di akses 3 November 2022

masuk kedalam politik. Maka dengan demikian akan melibatkan keluarga lainnya untuk terlibat dalam politik. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang kemudian membentuk dinasti politik. Hal itu yang terjadi di kota Subulussalam Ade Fadly Ketua DPRK Subulussalam periode 2019-2024 tergolong cepat menjadi anggota legislatif, Ade Fadly bergabung dengan partai politik pada tahun 2019. Faktanya pada tahun 2019 ayahnya sudah menjabat sebagai Walikota Subulussalam. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa sepertinya Ade Fadly memang sudah dipersiapkan untuk membentuk dinasti politik di Kota Subulussalam. Memanfaatkan momen tersebut Ade Fadly dapat menggunakan popularitas Ayahnya untuk meningkatkan elektabilitas. Sebab diketahui bahwa Ade Fadly adalah orang baru di politik Kota Subulussalam dan pada pencalonan pertama langsung menduduki jabatan sebagai Ketua DPRK. Memanfaatkan momen ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara Ade Fadly ketua DPRK Subulussalam mengatakan kepada peneliti ketika ditanya kenapa cepat sekali masuk dalam dunia politik, ia menjawab:

“Kenapa di usia 23 tahun karena ada pemikiran kalau aku tunggu ini 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin dasar yang hari ini ada begitu nanti 10 tahun baru terjun politik mungkin nanti lebih susah untuk memperbaikinya. Saya lihat ada kesempatan 5 tahun ini yaudah.”⁴⁶

Hal tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa Ade Fadly menggunakan momentum dan kekuasaan orangtuanya untuk dapat cepat mendapatkan tempat di perpolitikan Kota Subulussalam. selanjutnya, nama besar keluarga tampaknya juga menjadi faktor yang mendorong Ade Fadly untuk masuk ke arena politik.

⁴⁶ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2021

“saya membawa pertama nama keluarga saya nama besar keluarga saya saya yang bawak, selain pak walikota anaknya dpr dua dua nya ini adalah amanah terbesar yang diberi, harus kami jaga.yang kedua saya ada keterwakilan anak muda”⁴⁷

Dari pemaparan diatas dapat ditelaah bahwa memang ada Keinginan untuk mempertahankan status quo, nama besar keluarga cukup menguntungkan bagi actor tersebut. Sehingga mereka bisa menduduki posisi strategis dalam pemerintahan kota Subulussalam. lebih jauh lagi ketika peneliti mewawancarai salah seorang warga, peneliti menemukan informasi bahwa Ade Fadli sendiri belum banyak dikenal sebagai seorang politikus pada saat pemilihan. Ia terpilih karena dorongan oleh posisi ayahnya yang sudah lebih dulu menjabat walikota. Sebagaimana keterangan wawancara:

“Kenapa saya percaya awalnya memilih di itu karena tidak ada angin angin surga pembahasan anaknya ini akan naik, rupanya tiba-tiba serangan fajar anaknya kan naik kita gak tau, kita kaget kan tersembunyi. Dan bahkan kenaikan anaknya itu orang bahkan gak kenal si fadly tapi karena memang ada janji politik kepada masyarakat janganlah nanggung milih akum au gak mau menjadi harus ada niat memulai system kota subulussalam, jadi sia-sia perjuangan kalau tidak sekalian memilih anaknya.”⁴⁸

Namun meski posisinya didukung oleh praktik politik dinasti di Kota Subulussalam. Ketua DPRK Berjanji bahwa ia akan bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, dengan asas kepentingan masyarakat di atas segalanya. Sebagaimana di sampaikan dalam wawancara:

Kenapa ke politik karena ingin menyebarkan efek yang lebih luas tidak hanya dalam satu lingkup. Sekarang saya bisa membuat kebijakan untuk Sembilan puluh lebih orang masyarakat kota Subulussalam yang bisa merasakannya. Kenapa di usia muda? Ini kan menjadi pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya se simpel

⁴⁷ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Zikri pada tanggal 16 juli 2022

itu. Dengan politik kita bisa membawa kebaikan yang lebih luas untuk orang banyak. Jika polisi kita punya tugas pokok tersendiri dan juga kita punya atasan dan Batasan. Itu yang enak nya terjun ke politik berapa pahala yang sudah kita dapatkan luar biasa. Kita semua harus melek politik, memilih pemimpin yang baik juga termasuk amalan. Hampir sama semua orang yang masuk politik itu begitu jika ingin memikirkan orang lebih banyak.⁴⁹

Namun di tempat berbeda masyarakat yang menjadi informan peneliti menerangkan bahwa praktik politik dinasti ini membuat kepentingan masyarakat dikesampingkan, jadi hal yang utama sudah pasti adalah kepentingan keluarga atau satu golongan tertentu yang memegang kekuasaan. Lebih detail dalam wawancara sebagai berikut:

“Jika pemerintahan dikuasai oleh satu keluarga maka akan stagnan dan tidak ada perkembangan atau “mandul”. Fungsi legislatif dalam pengawasan bisa saja tidak berjalan karena hubungan kekeluargaan, bisa saja legislatif ikut serta berperan sebagai eksekutif. Maka tidak cocok jika jabatan strategis eksekutif dan legislatif diisi oleh satu keluarga.⁵⁰

Upaya mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan cara menguasai pemerintah dari dua sisi Ade Fadly sebagai Ketua DPRK yang merupakan legislative pemerintahan dan ayahnya H. Affan Alfian menjabat sebagai Wali Kota yang merupakan Eksekutif pemerintahan Kota Subulussalam. Kemudian juga melibatkan anggota keluarga yang lain yakni Ade Noviani Br. Bintang yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Kota Subulussalam. Belum lagi kerabat yang ada dalam susunan pemerintahan seperti dinas tertentu.

⁴⁹ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2021

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat Umum bapak Baginda Nasution 19 juli 2022

4.3.2. Masalah kaderisasi di partai

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.⁵¹

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁵²

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan

⁵¹ Ali Safa'at Muchamad, 2011, PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. Rajawali pers.Hal 4-5

⁵² *Ibid*

merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁵³

Dalam partai politik ada yang namanya peran, Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana perumusan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik 23 adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.⁵⁴

Kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota yang disiapkan dalam organisasi yang mengikuti proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio atau regenerasi) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.

⁵³ Miriam Budiardjo, 2008, dasar-dasar ilmu politik halaman 160-161

⁵⁴ Budiardjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik hal 405-409

Peran kaderisasi dalam organisasi sebagai berikut pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, penjamin keberlangsungan organisasi, dan sarana belajar bagi anggota. Dalam hal ini, proses kaderisasi dalam organisasi kepemudaan telah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan tentang kepemimpinan.⁵⁵

Namun yang terjadi di Kota Subulussalam fungsi pengkaderan seakan tidak berjalan fungsi karena memang setiap kader baru partai memang sudah disiapkan oleh keluarga yang terlebih dulu ada dalam dunia politik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang notabene merupakan anak dari dari Wali Kota Subulussalam. Ade Fadly mengatakan:

“Kalau di partai sebenarnya sudah lama kalau jadi kader memang baru 3 tahun ini masuk di kepengurusan tapi menjadi simpatisan sudah lama aktif di hanura. 2010 2011 itu sudah mulai sebelum jadi mahasiswa pun sudah masuk di partai udah memang ikut bentuk nya memang kita membantu organizer acara ulang tahun hanura jadi relawan lah.”⁵⁶

Fakta di atas dapat ditelaah bahwa sangat singkat waktu yang dilalui oleh Ade Fadly sebagai seorang kader partai politik. Kalau dihitung 3 tahun sejak 2022, berarti ia menjadi kader partai politik sejak tahun 2019 pada saat menjelang pemilu dan ketika sang ayah baru menduduki posisi Walikota Subulussalam. Hal ini semakin memperjelas bahwa kaderisasi yang terjadi di Kota Subulussalam hanya akan

⁵⁵ I Gede Dharma Gunawan, DKK. *Pentingnya Kaderisasi Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Pemimpin Muda Hindu Yang Inovatif*. Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 1 Tahun 2021 ISBN: 978-623-90547-7-9.

⁵⁶ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2021

mudah dilalui bila memiliki keluarga, kerabat dan sanak saudara yang sudah duluan bergabung dalam politik.

Dapat disimpulkan bahwa Ade Fadly tidak mengalami proses kaderisasi, karena pemilihan legislatif terjadi di tahun 2019. Pada tahun tersebut, Ade Fadly baru menjadi kader partai. Menariknya lagi, terpilih dan menjadi ketua DPRK Kota Subulussalam.

Padahal Partai politik di samping sebagai kendaraan politik juga berfungsi sebagai wadah penyiapan kader. Karena dengan semakin baik proses pengkaderan akan lebih banyak pilihan politisi yang dapat maju memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi dengan mengedepankan keluarga sebagai kader partai politik tentunya sistem politik yang ada hanya dikuasai oleh sekelompok tertentu atau lebih kita kenal dengan politik dinasti.

Hal ini karena kaderisasi merupakan suatu proses penurunan dan pemberian nilai-nilai, baik nilai-nilai umum maupun khusus, oleh institusi bersangkutan. Proses kaderisasi sering mengandung materi-materi kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya, karena yang masuk dalam institusi tersebut nantinya akan menjadi penerus tongkat kepemimpinan, terlebih lagi pada institusi dan organisasi yang dinamis.⁵⁷

Dengan menunjuk keluarga atau sanak saudara menjadi kader dalam waktu singkat, maka hal itu akan mempersempit peluang kader lain yang bisa jadi lebih siap untuk dicalonkan. Hal ini pula yang di praktekkan oleh Walikota Subulussalam

⁵⁷ Skripsi: Muslihah. 2013. Kaderisasi Mubaligh Melalui Pelatihan Khitobah. (Studi Kasus Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo).

yang mengkaderkan anak kandungnya dengan proses yang sangat cepat dan itu dilakukan tidak hanya pada satu orang anak saja. Tetapi dua anak Wali Kota sekaligus menjadi anggota DPRK Subulussalam.

Temuan peneliti di lapangan krisis kaderisasi di Kota Subulussalam yang hanya dimiliki oleh keluarga yang memiliki latar belakang politik atau yang memiliki kekuatan ekonomi yang mumpuni sehingga kader yang muncul ke permukaan hanya segelintir saja dalam kata lain politik di kota Subulussalam terkesan eksklusif.

4.4. Dampak Dinasti Politik terhadap Prinsip *Good governance* di Subulussalam

Menurut Ade Fadli Ketika ditanyakan apakah dinasti politik mempengaruhi *good governance*, ia menjawab seperti itu politik dinasti tidak begitu berdampak terhadap prinsip *Good governance* di Kota Subulussalam. Hal tersebut disampaikan kepada peneliti dalam wawancara, ia mengatakan:

*Tergantung pemimpinnya. dinasti politik ada juga terjadi di banten kenapa dia dipilih terus? karena dia menguasai mayoritas yang menginginkan dia kalau memang dia gak baik kan tidak dipilih orang. Itu adalah sesuatu yang sudah pasti tidak mungkin tidak.*⁵⁸

Padahal politik dinasti sangat berakibat fatal, diantaranya akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong- bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam Penegakan hukum di Indonesia, sering terganggu ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya

⁵⁸ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2022

bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa.

Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang 1945 mengenai peraturan daerah, pemerintah daerah yang menata kegiatan pemerintahan harus menjalankan tugasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga dalam mewujudkan ketentraman masyarakat melalui penambahan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya kompetensi masing-masing daerah dengan mencermati prinsip keadilan, demokrasi, pemerataan, keistimewaan, dan ciri suatu daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,⁵⁹ sesuai dengan konsep *welfare state*, pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum).⁶⁰

Dengan adanya politik dinasti dapat memungkinkan orang yang tidak berkompoten memiliki kekuasaan, karena hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem

⁵⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 14.

⁶⁰ Sri Warjiyati, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia*, *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, 2018, 6

pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Politik dinasti juga menyebabkan:

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan.⁶¹ Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.⁶²

Padahal kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut temuan lapangan peneliti masih banyak masyarakat yang masih mengeluh atas kinerja dari pemerintah baik legislatif maupun eksekutif sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut salah seorang masyarakat mengatakan:

“Walikota Kota Subulussalam dalam kepemimpinannya banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, berbeda jauh dengan janji kampanyenya sebelum menjadi walikota, masyarakat banyak yang tertipu dengan janji-janji politiknya dulu.”⁶³

Dari keterangan wawancara di atas dapat di telaah bahwa kepemimpinan dinasti yang dibentuk oleh keluarga Affan Alfian Bintang memiliki potensi tidak

⁶¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428> diakses 30 November 2022

⁶² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428> diakses 30 November 2022

⁶³ Wawancara dengan Zikri masyarakat Kota Subulussalam pada tanggal 16 Juli 2022

memikirkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan janji kampanyenya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya.⁶⁴

Bagi negara demokrasi, dinasti politik dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya bentuk ketidaksetaraan dalam perputaran kekuasaan politik, dimana hal itu adalah bentuk cerminan ketidaksempurnaan dalam representasi demokrasi dalam politik, yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan dan dapat pula menjadi penghambat partisipasi masyarakat karena status hak sosial yang berbeda dengan para elit pemangku kekuasaan. Karena seharusnya negara demokrasi memberikan peluang sebesar dan seluas mungkin kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kontes politik baik nasional maupun daerah.⁶⁵

Dinasti politik adalah sebuah wujud patrimonial karena adanya ikatan yang kuat dalam kekerabatan yang menjadi komponen utama dalam regenerasi politik

⁶⁴ M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good governance) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 48, Nomor 4, Oktober-Desember 2018, 884.

⁶⁵ Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Dinasti politik Di Indonesia, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 8, Nomor 2, 2020, 177-91.

dibandingkan melihat kemampuan ataupun prestasi yang dimiliki oleh calon kepala daerah sehingga hal ini tidak sejalan dengan prinsip *good governance* serta perlunya memperhatikan dampak yang 10 diberikan oleh sebuah praktik dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dan dengan menggunakan pembahasan prinsip *good governance*, dapat ditemukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hal tersebut persis yang sedang terjadi di kota Subulussalam dinasti politik yang dibangun oleh satu keluarga menimbulkan pro kontra yang akhirnya kepentingan dari masyarakat yang dikesampingkan. Hal ini tentunya dampak yang sangat negatif dalam mencapai kesejahteraan dan tatanan pemerintahan yang baik di Kota Subulussalam.

4.4.1 Terhadap akuntabilitas

Adanya Praktik dinasti politik dikhawatirkan akan mengganggu prinsip-prinsip akuntabel suatu pemerintahan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi dapat dikatakan bilamana terjadi dinasti politik maka prinsip akuntabilitas ini akan sulit tercapai karena adanya relasi kuasa antara anggota keluarga dalam tubuh pemerintahan Kota Subulussalam. sebab Ade fadly ketika peneliti menanyakan bagaimana strategi yang dilakukan agar ikatan kekeluargaan tidak mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dalam bertugas, Ia menjawab:

“Ada 2 cara yang bisa saya lakukan pertama saya sebagai tim sukses pak walikota saya bisa langsung menyampaikan kritik dan saran namun jika sampai saat itu tidak ada kita bisa bawa ke Lembaga”⁶⁶

Selain itu, politik dinasti ini cenderung negatif karena ada ketakutan terjadi Konflik of interest atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat berakibat kepada pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik dan juga dapat merusak akuntabilitas dari pemerintahan tersebut. Namun pastinya sebagai tim sukses sekaligus juga anak, akan sangat sulit untuk bisa objektif. Hal ini juga akan melemahkan fungsi legislatif sebagai lembaga pengawasan terhadap eksekutif sehingga tidak akan terciptanya *Check and Balance*. Objektivitas pengawasan legislatif terhadap eksekutif juga dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana dalam keterangan wawancara:

“Memandang dari kacamata saya belum objektif, segala apa pun yang akan di tindakan oleh anak bapak pasti di pandu oleh seorang mamak, mamak bisa masuk contoh sebelum mereka ada paripurna mereka bisa di dudukan dulu membahas apa yang ingin dibahas nantinya.”

Tetapi Ade Fadly menganggap bahwa kinerjanya masih sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas eksekutif. Sebagaimana keterangan tersebut ia sampaikan kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya mau ngasih tau bahwa dpr itu tidak melulu tentang melawan pemerintah hadirnya legislatif itu mendukung kemajuan daerah bukan melawan pemerintah. Kapan kita harus melawan ? Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai. O pak walikota misalnya dinas terkait melakukan kerja yang membuang-buang uang atau yang tidak sesuai. Hari ini saya mau tanya mana yang tidak sesuai dari pemerintah. Kebanyakan yang di kritik kan masalah banyak nya acara seremonial ya memang itu acara rutin gitu kan, tapi apa kebijakan pemerintah

⁶⁶ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2022

*yang dapat merugikan masyarakat? tidak ada semua sesuai dengan perundang undangan yang ada.*⁶⁷

Dari data wawancara di atas dapat kita telaah bahwa jika Legislatif dan eksekutif yang dalam hal ini adalah Walikota dan DPR Kota Subulussalam adalah keluarga. Dengan terjadinya politik dinasti membuat kinerja pengawasan dari DPR menjadi lemah karena konflik kepentingan tadi. Maka pemerintahan yang tercipta tidak akuntabel. Selain itu pandangan masyarakat Subulussalam yang menganggap terjadinya politik dinasti ini akan mengurangi integritas masing-masing dan cenderung menjalankan pemerintahan sesuai kepentingan keluarga. Hal ini disampaikan oleh informan yang peneliti wawancarai yang mengatakan:

*“Dinasti politik suatu hal yang buruk untuk diterapkan, karena penguasa mempunyai kekuatan yang luar biasa dan cenderung dapat melakukan apa saja jika dalam lingkaran pemerintahan dijalankan oleh keluarga.”*⁶⁸

Selain itu penempatan ke keluarga dalam jajaran pemerintah menambah keruh pemerintahan Kota Subulussalam kepemimpinan dinasti politik Affan Alfian Bintang hal tersebut dapat dilihat dari keterangan masyarakat yang mengatakan:

*Penempatan skpk sebagai pembantu kepala daerah diisi oleh kerabat itu saya kira belum tepat, boleh menempatkan beberapa org satu dua tapi kalau sudah berlebihan ini berpotensi terhadap pengaruh-pengaruh tidak baik missal saja nanti ini program kepentingan kelompok.*⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dalam suatu pemerintahan terbentuk dinasti politik maka mengkonfirmasi bahwa pemerintahan tersebut tidak akuntabel. Hal ini

⁶⁷ Wawancara dengan Ade Fadly Pranata Bintang., S.Ked Ketua DPR Kota Subulussalam pada 18 juli 2022

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat Umum Zikri 16 juli 2022

⁶⁹ Wawancara dengan masyarakat dengan Edy pada tanggal 10 juni tahun 2022

terjadi di pemerintahan kota subulussalam pada masa pemerintahan Alfian Bintang.

4.4.2 Demokrasi

Prinsip demokrasi dalam suatu pemerintahan adalah nilai mutlak yang harus dijalankan oleh pemerintahan manapun. Di Kota Subulussalam masyarakatnya menganggap bahwa jabatan keluarga adalah hal yang wajar. Sebagaimana keterangan wawancara salah satu masyarakat.

“Memang ada sebuah simalakama, simalakama dalam kebaikan dulu kalaulah Namanya ada hubungan antara KKN terjadi itu pasti terjadi namun demikian kadang yang dijadikan kolusi ini mungkin wajar sudah tepat misalkan seorang keluarga pak walikota diangkat menjadi kepala dinas, yang punya latar belakang sebenarnya wajar tapi karena keadaan seperti ini masyarakat dan public ini merasa tidak wajar. Tapi yang Namanya ada sebuah kekeluargaan ini ini lah nanti nya menjadi hambatan yang dianggap demokrasi, kalau adalah latar belakang orang yang orang hukum yang keluarga nya juga orang hukum tentu keluarga nya dulu diutamakan.”⁷⁰

Dinasti politik memberikan banyak dampak negatif terhadap perkembangan pendemokrasian yang ada di Indonesia, seperti lemahnya prinsip check and balances, konstruksi politik yang didirikan oleh dinasti semakin kuat, dan dinasti politik juga menutup jalan rekrutmen bagi orang-orang baru yang circle-nya berada di luar anggota dinasti.⁷¹

Sehingga menimbulkan penilaian negatif kepada dinasti politik yang faktanya tidak terlepas dari berbagai kasus di pemerintahan, seperti kasus korupsi atau nepotisme yang sangat marak terjadi di berbagai tingkat pemerintahan karena

⁷⁰ Wawancara dengan masyarakat umum Baginda Nasution pada tanggal 19 juli 2022

⁷¹ Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Dinasti politik Di Indonesia, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol. 8, Nomor 2, 2020, 177-91

kuatnya kekuasaan dinasti politik dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Namun ditemukan pula sisi positif yang dapat diambil pada fenomena dinasti politik yaitu, calon yang maju pada pemilihan kepala daerah sudah dikenal oleh masyarakat karena telah mempunyai bekal politik dan kisah politik yang panjang dalam keluarganya, sehingga akan menjadi lebih unggul dari calon lainnya.

Keluarga H. Affan Alfian Bintang merupakan salah satu keluarga yang memiliki pengaruh besar di kota Subulussalam. Tentunya ini dapat menjadi modal untuk menempatkan anggota keluarga di pemerintahan. Misalnya pencalonan Lilis Bintang sebagai kepala Desa Makmur Jaya, kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Lilis adalah calon kepala desa yang secara suara kalah dari kawan politiknya. Namun pemilihan ini menjadi sengketa dan Lilis meminta untuk diadakan pemilihan Ulang. Kemudian dengan Privilege Lilis yang merupakan adik kandung Walikota. Dari pemerintahan mengeluarkan surat edaran melakukan pemilihan ulang.⁷²

Hal ini disayangkan oleh masyarakat bahwa di subulussalam itu semua hal diatur oleh walikota. Jika suatu kekuasaan sudah dikuasai oleh satu keluarga tentunya hal itu akan menghambat kepentingan masyarakat Subulussalam. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan yang peneliti mewawancarai sebagai berikut:

“Tentunya punya kendala, tapi berdampak bukan pada pemerintah, melainkan terhadap masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat, ketakutan masyarakat ada kepentingan golongan tertentu yang

⁷² <https://strateginews.co/2022/11/23/walikota-subulussalam-putusan-pilkades-ulang-desa-makmur-jaya-sesuai-rekomendasi-tim-pengawas-tingkat-kota/> di akses pada 3 Desember 2022

nantinya malah melupakan kepentingan kesejahteraan masyarakat.”⁷³

Ketakutan seperti dalam wawancara diatas jelas ada alasan dasar karena kekuasaan yang dipegang oleh keluarga kerap kali kepentingan masyarakat terlupakan. Karena konflik kepentingan yang terjadi saat menjalankan pemerintahan. Kemudian tujuan mewujudkan *Good governance* di Kota Subulussalam hanya akan menjadi ilusi

Berbagai jurnal karya ilmiah yang membahas tentang dinasti politik menunjukkan bahwa jika memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana maka akan memberikan jalan mulus atau cepat bagi seseorang untuk dicalonkan oleh partai politik, sehingga membuktikan bahwa ada masalah pada proses rekrutmen politik dalam pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh sebuah partai politik karena lebih mendahulukan anggota kelompok dinasti atau elit yang berkuasa yang di daerah tersebut. Selain itu demokrasi dipahami pula sebagai toleransi.

Temuan menariknya adalah meski di kota subulussalam adanya praktik politik dinasti. Hal tersebut tidak mengganggu keberagaman yang ada disana. Kerukunan hidup berdampingan beda suku, beda ras, beda agama. Pemerintah cukup baik dalam merawat keberagaman dan subulussalam toleransinya sangat baik, sebagaimana salah satu informan dalam keterangan wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Kalau toleransi yang pertama antar umat beragama dulu, kalau kita ketahui baik bagaimana kita lihat beberapa non muslim yang ada di subulussalam saya kira hubungan itu dari awal dulu pemerintahan aceh selatan, aceh singkil, dan sudah menjadi kota subulussalam masih baik.”⁷⁴

⁷³ Hasil wawancara dengan Masyarakat Umum Zikri 16 juli 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Baginda Nasution masyarakat Umum Kota Subulussalam 19 juli 2022

Kemudian dalam kehidupan majemuk dengan berbagai suku juga berhubungan dengan baik tidak ada pengaruh politik dinasti terhadap itu:

“Dan begitu juga hubungan antara keragaman dan kesukuan subulussalam menurut saya paling baik, begitu juga orang daerah dan luar daerah. Subulussalam itu merasa dirinya tamu itu yang terhormat.”⁷⁵

Dinasti politik yang terjadi di Kota Subulussalam sangat berpengaruh terhadap pemerintahan. Meskipun dari wawancara di atas dapat ditarik benang merah bahwa untuk toleransi beragama, suku dan budaya tidak terpengaruhi oleh adanya politik dinasti di Kota Subulussalam ini.

4.4.3 Transparansi

Selain dari itu dinasti politik juga menyebabkan transparansi pemerintah tidak ada, yang bisa diakses oleh public hanya berita keberhasilan pemerintah ditampakan Sedangkan keburukan tidak ditampakan. Sebagaimana salah satu warga saat di wawancarai mengatakan:

Kalau keterbukaan informasi mengenai perihal yang sifatnya kebaikan pemerintah itu terus update, tapi Ketika ada keburukan pemerintah dalam segi ekonomi atau kegagalan seperti di sembunyikan, mengenai covid-19 lah kita bilang itu kan tidak akurat yang tidak kita dapat, banyak persoalan yang disembunyikan sampai saat ini.⁷⁶

Dari data di atas dapat ditelaah bahwa dinasti politik malah membuat tidak adanya transparan kepada masyarakat. Padahal salah satu kunci untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi public. Kemudian keterangan lain dari masyarakat juga sejalan dengan pendapat di atas, yang mengatakan:

⁷⁵ Wawancara dengan Baginda Nasution masyarakat Umum Kota Subulussalam 19 juli 2022

⁷⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Zikri pada tanggal 16 juli 2022

Indeks pertumbuhan ekonomi kita di manipulasi coba hitung, jangan kan itu wpp aja kan di tukang tukang wpp (wajar tanpa pengecualian) kan dibayar itu. Nah inilah yang ditipu keluar biar masyarakat tau. Masyarakat yang tidak tau merasa hebat wpp padahal isinya hancur belur.⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya dinasti politik di kota Subulussalam menyebabkan pemerintah kurang transparan kepada masyarakat.

4.4.4 Prinsip kesetaraan dan keadilan

Praktik dinasti politik di tubuh pemerintahan Kota Subulussalam juga ikut melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. Misalnya keadilan ekonomi, temuan peneliti di Kota Subulussalam perekonomiannya di monopoli dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Yang kerap kali memegang kendali perekonomian ini adalah penguasa. Sebagaimana salah satu warga saat peneliti mewawancarai mengatakan:

“Ekonomi dan pertumbuhan manusia nya, di subulussalam ini itu cenderung dikuasai secara monopoli ekonomi itu dikuasai secara monopoli, monopoli apa menguasai semua sumber ekonomi dikuasai oleh perorang, orang perorang ini pak walikota semua di kota nya, ini yang tidak berjalan”⁷⁸

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perekonomian di Kota Subulussalam di monopoli oleh pemilik modal dan penguasa. Padahal negara sudah menjamin hak setiap masyarakat itu sama. hal ini terjadi bukan tidak ada alasan, monopoli seperti ini diindikasikan karena adanya dinasti politik yang sudah dibangun di Kota subulussalam. bahkan sumber-sumber ekonomi yang ada di sana dikuasai oleh perseorangan sehingga terkesan eksklusif. Sebagaimana keterangan masyarakat dalam wawancara:

⁷⁷Hasil wawancara dengan masyarakat umum Dita Karya pada tanggal 19 juli 2022

⁷⁸ Wawancara dengan masyarakat kota Subulussalam Adita Karya pada 22 juli 2022

Tau kamu dari tukang kue semua ditentukan untuk job di kantor-kantor jadi kami dapat apa? hingga hal hal kecil sampai yang kecil juga⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Subulussalam melakukan upaya mengontrol dan memonopoli sumber-sumber ekonomi masyarakat bahkan hal terkecil sekalipun seperti yang sudah disampaikan dalam wawancara diatas.

Padahal dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi;⁸⁰

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

⁷⁹Wawancara dengan masyarakat Umum Adita Karya pada tanggal 19 juli 2022

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Dengan terbentuknya dinasti politik di Kota Subulussalam mengakibatkan keadilan dan kesetaraan hak yang seharusnya sama menjadi hanya milik segelintir orang atau kelompok saja.

4.4.5 Budaya Hukum

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.⁸¹ Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁸²

Bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu, dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.⁸³ Maka pentingnya budaya hukum menjadi satu acuan dalam penegakkan hukum di Kota Subulussalam.

⁸¹ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

⁸² Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964),

⁸³ Fence M. Wantu, SH., MH. *Pengantar Ilmu Hukum* ISBN 978-602-72133-6-4, REVIVA CENDEKIA: 2015

Sejak 2018 keberadaan Kejari Subulussalam sudah mampu mengungkap lima kasus korupsi di Kota Subulussalam.⁸⁴:

1. Kasus korupsi dugaan penyalahgunaan dana desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tahun anggaran 2019 dan 2020.
2. Kasus Korupsi pembangunan pusat kegiatan revitalisasi pasar tradisional dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Proyek pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kota Subulussalam Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2019.
4. pada proyek pembangunan pagar Rumah Sakit Umum (RSUD)
5. kasus proyek fiktif senilai Rp 795 juta

Pengungkapan kasus-kasus korupsi di Subulussalam sekaligus mengindikasikan dua hal. Pertama, dapat dilihat bahwa penegakkan hukum semakin menunjukkan performa yang positif dengan mampu diungkapkannya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Kota Subulussalam. Namun, di balik penegakan hukum yang semakin baik itu, sangat disayangkan pula bahwa pada kenyataannya praktik korupsi terlihat masih terus berkembang di Kota Subulussalam.

⁸⁴ Hebat! Kejari Subulussalam Gencar Ungkap Kasus Korupsi Dalam 4 Tahun, Ini Deretan Perkaranya, <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/22/hebat-kejari-subulussalam-gencar-ungkap-kasus-korupsi-dalam-4-tahun-ini-deretan-perkaranya>

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian peneliti dan mendapatkan hasil sebagaimana sudah peneliti sajikan dalam bab sebelumnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil intisari atau kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya dinasti politik yang terbentuk Kota subulussalam yang mana Walikota dan Ketua DPRK merupakan Ayah dan Anak, kemudian keluarga lainnya juga terlibat dalam pemerintahan Kota Subulussalam, misalnya menjadi anggota DPRK, Bakal Calon Keuchik dan pemegang kekuasaan strategis lainnya.
2. Politik dinasti yang terjadi di Kota subulussalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good governance* yang dibuktikan dengan tidak terpenuhi prinsip: Transparansi, demokrasi akuntabilitas budaya hukum, dan kesetaraan dan keadilan.

5.2 SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan secara praktis untuk mencegah terjadinya dinasti politik di tingkat daerah yaitu:

1. menguatkan pengawasan pemilu dan penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu untuk mencegah politik dinasti dan politik uang,
2. meningkatkan pengawasan dan fungsi dari partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas, dan
3. Memperbaharui aturan-aturan hukum yang berlaku untuk membatasi ruang gerak dari politik dinasti.

Secara sisi akademis saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Memperkuat kajian teoritis untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dinasti politik di tingkat daerah, dan
2. Menggunakan pendekatan dan metode yang multidisipliner untuk mengetahui bentuk-bentuk dinasti politik di masing-masing daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2013

Siagian, P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

MoleongLaxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2016

Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

Jurnal/Skripsi

Alim Bathoro, *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal FISIP UMRAH VOL 2. 2011.

Cahyaningtyas, N. (2018). Politik Dinasti di Kabupaten Kediri Pertukaran Sosial TIM Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Negara Desa Parelor Kecamatan Kunjang. *Paradigam* Vol 6 No 1, 25-27.

Faisal Hanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017

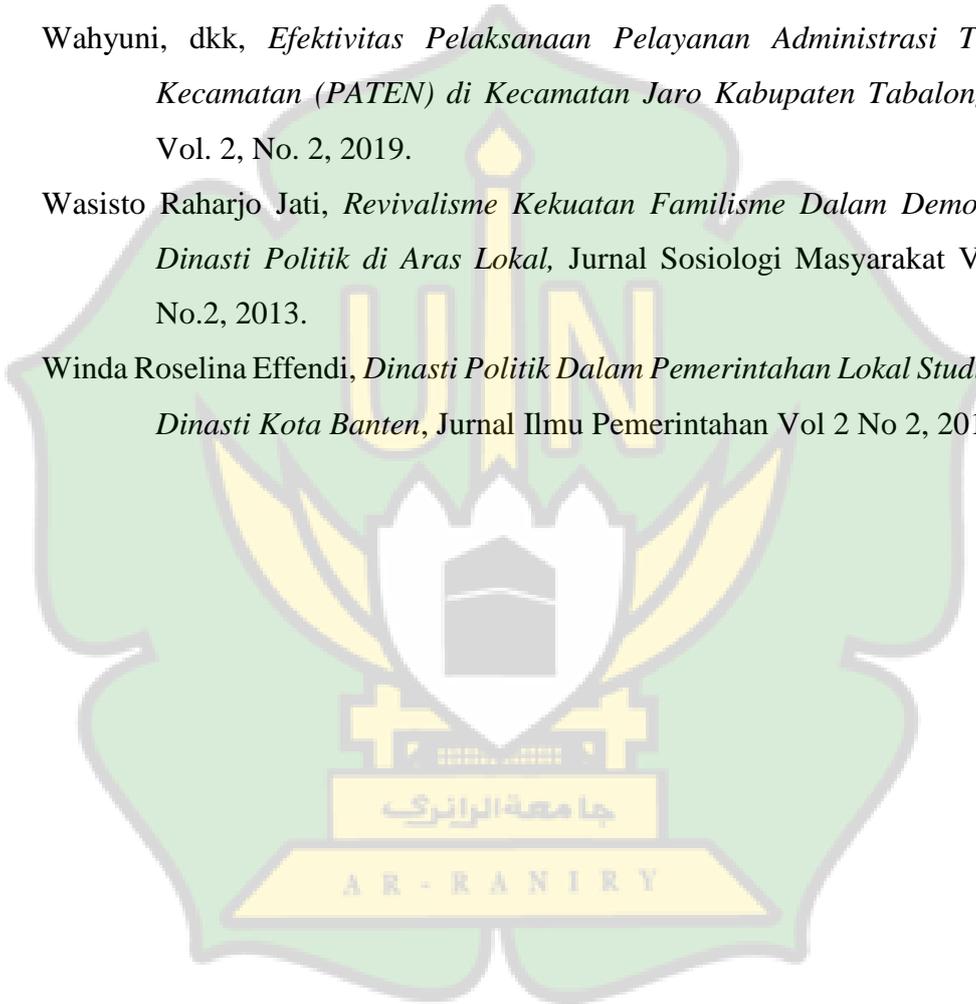
Ilham Ramadhan, *Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018

Jumrah, *Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018

Wahyuni, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*.JAV: Vol. 2, No. 2, 2019.

Wasisto Raharjo Jati, *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal*, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No.2, 2013.

Winda Roselina Effendi, *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2, 2018.



LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian



